



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 888/III/XI/2015



DPR BERHARAP HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA — ITALIA MENINGKAT



**KUALITAS DAN
KAPASITAS APARAT
DESA HARUS
DITINGKATKAN**



**RUU MINOL
UNTUK MENGATUR
DISTRIBUSI DAN
KONSUMSI MIRAS**

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



DPR BERHARAP HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA – ITALIA MENINGKAT



Ketua DPR Setya Novanto saat menerima kunjungan Presiden Italia Mr. Sergio Mattarella di ruang tamu pimpinan DPR, Senayan Jakarta

Nilai perdagangan Indonesia dengan Italia pada tahun 2013 mencapai 3,82 miliar dollar AS. Pada tahun 2014 meningkat menjadi sekitar 4 miliar dolar AS. DPR akan mendukung kerja sama kedua negara, dan berharap hubungan perdagangan antara kedua negara meningkat.

“Kita mendukung kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Italia. Dukungan ini akan kita wujudkan terus. Kami berharap hubungan perdagangan kedua negara ke depan dapat terus ditingkatkan, begitu juga kerja sama di bidang-bidang lainnya, termasuk investasi,” kata Ketua DPR Setya Novanto saat menerima kunjungan Presiden Italia Mr. Sergio Mattarella,” di Gedung Nusantara III, Senin (9/10/15) petang.

Dalam kesempatan ini, Novanto didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua

Komisi I Tantowi Yahya, dan Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun. Sementara dari sisi Pemerintah, hadir Menteri Pariwisata, Arief Yahya.

Novanto menambahkan, hubungan bilateral antara Indonesia dan Italia yang terjalin selama lebih dari 60 tahun sejauh ini telah berjalan dengan baik. Sejumlah perjanjian kerja sama juga telah disepakati oleh kedua negara sebagai landasan penguatan hubungan bilateral.

Salah satunya, dengan dibentuknya Asosiasi Persahabatan dan Kerja Sama Indonesia – Italia pada tahun 2006, serta Forum Konsultasi Bilateral pada tahun 2009.

“Ini menunjukkan eratnya hubungan bilateral kedua negara. DPR akan mendukung sepenuhnya berbagai upaya peningkatan kerja sama bilateral Indonesia – Italia, terlebih jika hal itu akan membawa kemajuan bagi kehidupan masyarakat kedua negara,” imbuh Novanto.

Politikus F-PG itu menilai, banyak potensi kerja sama yang bisa dikembangkan oleh kedua negara. Potensi kerja sama tersebut tidak saja berkaitan dengan aspek ekonomi, perdagangan dan investasi, tetapi juga aspek sosial-budaya dan pariwisata.

“Kami berharap Italia juga dapat mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung penguatan konektivitas maritim yang saat ini menjadi prioritas Pemerintahan Joko Widodo,” harap Novanto.

Dalam kesempatan ini, Novanto juga mengutarakan bahwa Indonesia ingin belajar dari pengalaman Italy tentang manajemen keuangan khususnya *asset recovery* pengembalian dana luar negeri. Ia juga berharap Italia mendapatkan dukungan usulan bebas visa bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk ke Eropa, via Schengen.

Hubungan antar parlemen pun turut menjadi pembahasan. Politikus asal dapil NTT itu mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan Parlemen Italia untuk memajukan hubungan bilateral kedua negara.

Apalagi, “DPR RI kini memiliki peran diplomasi untuk mendukung politik luar negeri Pemerintah, termasuk untuk mendukung penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat,” kata Novanto, sembari menjelaskan bahwa saat ini DPR RI sedang menuju parlemen modern.

Fadli Zon menambahkan, banyak potensi yang bisa dikembangkan oleh

BULETIN PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dr.

Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos; Ketut Sumerta, S. IP

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos; Supriyanto;

Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati; Muhammad Husen;

Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO: Eka Hindra

FOTOGRAFER: Rizka Arinindya; Naefuroji; M. Andri

Nurdriansyah; Yaserto Denus Saptoadji; Andi Muhamad; Jaka Nugraha

SIRKULASI: Abdul Kodir, SH, Bagus Mujiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara

II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp.

(021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr-

pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

kedua negara. Soal hubungan bilateral Parlemen, mendapat sambutan baik dari Presiden Italia.

“Karena hubungan parlemen menjadi salah satu cara untuk *people to people*

contact,” kata politikus F-Gerindra itu. Sementara terkait dari sisi investasi, Fadli mengakui, Italia masih mengalami defisit. Sehingga hubungan baik ini masih dapat ditingkatkan oleh kedua

negara. “Pariwisata juga sangat populer di kedua negara,” imbuh politikus asal dapil Jawa Barat itu. (SF) FOTO: DENUS /PARLE/HR

JEPANG NEGARA SAHABAT YANG PENTING

Persahabatan dengan Jepang sudah berjalan begitu lama. Apalagi, Jepang merupakan negara investor terbesar di Indonesia. Jadi, sebagai negara sahabat, posisi Jepang sangat penting bagi Indonesia.

Demikian dikemukakan Ketua DPR RI Setya Novanto saat berkunjung ke Tokyo, Jepang untuk bertemu dengan Ketua Majelis Rendah Jepang. Banyak sektor kerja sama yang terus dibangun, seperti pariwisata, pendidikan, hingga politik dan ekonomi. Kunjungan ke Jepang ini beberapa waktu lalu itu, atas undangan parlemen Jepang. Bersama Novanto, ada Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan beberapa Anggota DPR lainnya.

Ketua Majelis Rendah Jepang Oshima Tadamori dan Ketua Majelis Tinggi Jepang Yamazaki Masaaki menyambut dengan hangat kedatangan delegasi DPR. Kunjungan ini sekaligus juga menyambung kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang maret lalu dan bertemu dengan Perdana Menteri Sinzo Abe. Pada Konfrensi Asia Afrika di Jakarta, Sinzo Abe juga hadir dan bertemu Presiden Jokowi.

“Jepang merupakan salah satu negara investor terbesar bagi Indonesia. Hingga saat ini investasi Jepang di Indonesia telah mencapai 2,9 milyar dolar Amerika,” ungkap Novanto. Ia berharap ke depan kerja sama kedua negara dapat ditingkatkan, tidak hanya dalam bidang ekonomi dan investasi, tapi



Delegasi DPR RI berfoto bersama Majelis Rendah dan Majelis tinggi Jepang

juga dalam bidang pendidikan dan sumber daya manusia, khususnya pendidikan perikanan, pertanian, dan infrastruktur.

Sebelumnya, delegasi DPR juga bertemu dengan President of Japan-Indonesia Association, Yashuo Fukuda. Fukuda juga mengakui, Indonesia merupakan negara besar di kawasan ASEAN dan sangat penting bagi Jepang. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Fukuda berharap Indonesia semakin kuat dan stabil, baik di bidang politik maupun ekonomi. Selain bertemu parlemen dan perdana menteri, Ketua DPR juga melakukan kunjungan kehormatan dengan menemui Kaisar Jepang Akihito dan permaisuri Michiko. (MH), FOTO : RONI/PARLE/HR.

HARUS ADA KETENTUAN DALAM MENENTUKAN PAHLAWAN NASIONAL



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Gelar Pahlawan, tentu tak bisa diberikan kepada sembarang orang. Namun harus memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan. Termasuk di dalamnya, ada perbedaan ketentuan dalam gelar pahlawan nasional, ataupun pahlawan di bidang tertentu.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, saat menanggapi pertanyaan wartawan, terkait rencana Pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sebagaimana diketahui, Pemerintah, melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) sudah memutuskan untuk memberi gelar pahlawan kepada Gus Dur.

“Kalau menurut saya, mengenai pahlawan itu kan sudah banyak dibicarakan. Tetapi seharusnya yang diutamakan itu mereka yang mempunyai suatu *track record* di dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan,” kata Fadli, di Gedung Nusantara III, Senin (9/11/15) petang.

Politikus F-Gerindra itu menambahkan, seseorang bisa dianugerahi gelar pahlawan nasional jika telah berjasa dan berjuang tanpa pamrih dengan segala upayanya melebihi apa yang di tugaskan kepadanya. Terutama dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan saat revolusi fisik.

“Jika tidak ada ketentuan seperti itu, nanti pahlawan ini akan makin banyak lagi, bahkan bisa ribuan pahlawan nasional kita. Bisa menjadi negara yang paling banyak pahlawan nasionalnya. Jadi harus ada kategorisasi pahlawan, diluar kategori pahlawan nasional,” imbuh Fadli.

Kembali ke rencana pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur, Fadli menilai, sebaiknya gelar pahlawan di bidang tertentu. Ia melihat, Gus Dur berjasa di bidang kebudayaan dan toleransi beragama.

“Kalau menurut saya Gus Dur adalah pahlawan di bidang-bidang yang lain, seperti toleransi beragama atau bidang

kebudayaan. Tapi kalau revolusi fisik, rasanya ayah dan kakek Gus Dur lebih tepat. Gus Dur sendiri bukan orang yang melakukan kemerdekaan atau terlibat di dalam revolusi,” analisa Fadli.

Politikus asal dapil Jawa Barat itu malah lebih setuju jika gelar pahlawan disematkan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Pasalnya, Pak Harto hadir dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Pak Harto jelas ada dalam Serangan Umum 1 Maret. Itu jasanya jelas tidak bisa di pungkiri dan pak Harto ini juga termasuk tokoh yang merekonsiliasi antara Soekarno-Hatta dengan Jendral Soedirman, karena Pak Harto ini adalah orang kepercayaan dari Jenderal Soedirman,” kilas balik Fadli.

Fadli juga menilai, karena jasa-jasanya dalam memimpin Indonesia selama 32 tahun, Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. (SF) FOTO: DENUS/PARLE/OD

KETUA DPR KAGUMI PERJUANGAN ROSSI



Pimpinan DPR dan Ketua BKSAP saat menjawab pertanyaan wartawan

Perebutan gelar juara dunia MotoGP di Valencia, Spanyol, akhir pekan lalu, tak luput dari pantauan seorang Ketua DPR Setya Novanto. Kekaguman kepada seorang pebalap

berkebangsaan Italia, Valentino Rossi, yang gagal mendapat gelar juara dunia, tetap mendapat apresiasi dari Novanto.

Hal itu ia sampaikan saat menjamu Presiden Italia, Sergio Mattarella, saat berkunjung ke Gedung Nusantara III, Senin (9/11/15) petang. Novanto mengatakan, masyarakat Indonesia memiliki kekaguman yang tinggi terhadap Rossi.

“Terkait Rossi, saya bilang kepada beliau (Presiden Italia), bahwa kami kagum dengan dia (Rossi). Walaupun dia (Rossi) kalah di urutan keempat (pada MotoGP Valencia),” kata Novanto, usai pertemuan.

Politikus Partai Golkar itu juga mengatakan, walaupun Rossi gagal merebut gelar juara dunia MotoGP 2015, masyarakat Indonesia tetap memberi dukungan kepada Rossi melalui media sosial.

“Jadi Presiden Italia mengatakan, dalam olahraga MotoGP, kalah menang tidak masalah, yang penting sportivitas,” ujar Novanto, mengutip ucapan Presiden Italia.

Novanto menambahkan, Presiden Italia menghargai antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Rossi. Secara pribadi, Novanto juga menyampaikan apresiasinya terhadap Rossi melalui Mattarella.

“Saya apresiasi kepada Presiden Italia, terhadap pebalap Rossi,” imbuh politikus asal dapil NTT itu.

Sebagaimana diketahui, Rossi dikalahkan rekan setimnya, Jorge Lorenzo, dalam perebutan gelar juara dunia. Pebalap yang dijuluki The Doctor itu kalah lima poin dari Lorenzo di akhir musim. Dengan begitu Lorenzo berhasil menggeser Rossi di puncak klasemen pebalap. (SF), FOTO: ANDRI/PARLE/HR.

FAHRI HAMZAH NILAI SOEHARTO LAYAK DAPAT GELAR PAHLAWAN

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto layak mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional oleh Pemerintah. Pasalnya, selama 32 tahun memimpin Indonesia, Soeharto mewariskan berbagai pembangunan

yang sangat berarti bagi Bangsa Indonesia. Walaupun, tak jarang menuai kritik tajam.

“Pak Harto memimpin secara kuat bangsa ini, walau menuai banyak kritik. Namun ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan infrastruktur

yang relatif kuat untuk kita, baik itu fisik maupun non fisik. Sehingga, negara kita bisa survive sampai sekarang. Karena jasa beliau, sehingga layak diberi penghargaan sebagai pahlawan,” kata Fahri, di Gedung Nusantara III, Senin (9/11/15) petang.

Politikus F-PKS itu mengakui, bukan berarti kepemimpinan Soeharto tanpa adanya kekurangan. Akan tetapi, hal itu tak seharusnya menjadi alasan untuk tidak memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto. Apalagi, Soeharto juga peran andil dalam proses kemerdekaan Indonesia.

“Semua orang ada kelemahannya. Jika kita bicara nilai baik, Pak Harto juga memiliki nilai baiknya. Kecewa kan hal yang biasa. Pak Harto sabar menghadapi kritikan yang ditujukan kepada dirinya. Daya tahan yang belum tentu orang lain mampu mengahdapinya,” jelas Fahri.

Bahkan, tambah Fahri, para mantan Presiden Indonesia yang lain pun layak mendapat gelar pahlawan. Karena pada dasarnya semua mantan presiden adalah orang baik. Untuk itu, ia juga mendukung jika Presiden ke-4 Indone-



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

sia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, jika akan dianugerahi gelar pahlawan.

“Itu mekanisme negara menghargai jasa pahlawan kita. Kalau pemerintah menilai layak kita serahkan kepada pemerintah soal hal itu. Sulit untuk mengatakan Gus Dur tak memiliki jasa,

dia punya jasa banyak. Salah satunya karena beliau adalah ketua ormas Islam terbesar,” imbuh politikus asal dapil NTB itu.

Seperti diketahui, jelang peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tiap 10 November, Presiden Jokowi menganugerahkan gelar pahlawan kepada lima pejuang Indonesia. Kelima tokoh yang mendapat gelar pahlawan adalah Alm Bernard Wilhelm Lopian, Alm. Ki Bagus Hadikusumo, Alm. Mas Isman, Alm. Komjen Dr H Moehammad Jasin, dan Alm. I Gusti Ngurah Made Agung.

Sementara untuk pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur, Menteri Sosial Khoffah Indar Parawansa mengatakan hanya tinggal menunggu waktu. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) telah memutuskan bahwa Gus Dur akan dianugerahkan gelar pahlawan. (SF), FOTO : NAEFUROJI/PARLE/HR.

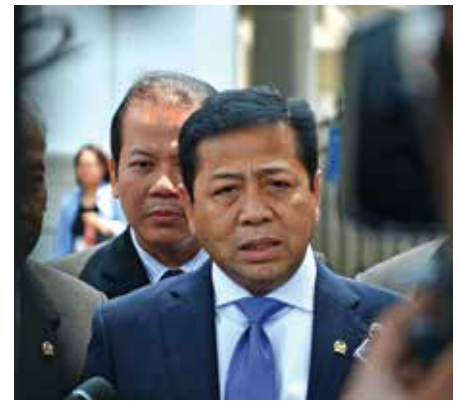
APEL PAMDAL, TEKAD PENGAMANAN PARLEMEN MODERN

Apel bersama Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR, MPR, dan DPD RI mengawali tekad pengamanan yang terkendali menuju parlemen modern. Bertempat di halaman parkir Nusantara III, apel dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Setya Novanto.

Dalam amanatnya, Novanto menyampaikan beberapa hal penting kepada satuan Pamdal agar menjaga

gending parlemen dari ancaman instabilitas. Parlemen modern harus memiliki lingkungan yang nyaman dan terkendali. Hadir juga dalam apel bersama itu, pasukan TNI dan Polri. Wakil Ketua DPR Fadli Zon ikut menyaksikan apel yang dimulai pukul 08.00 WIB pada Senin (9/11).

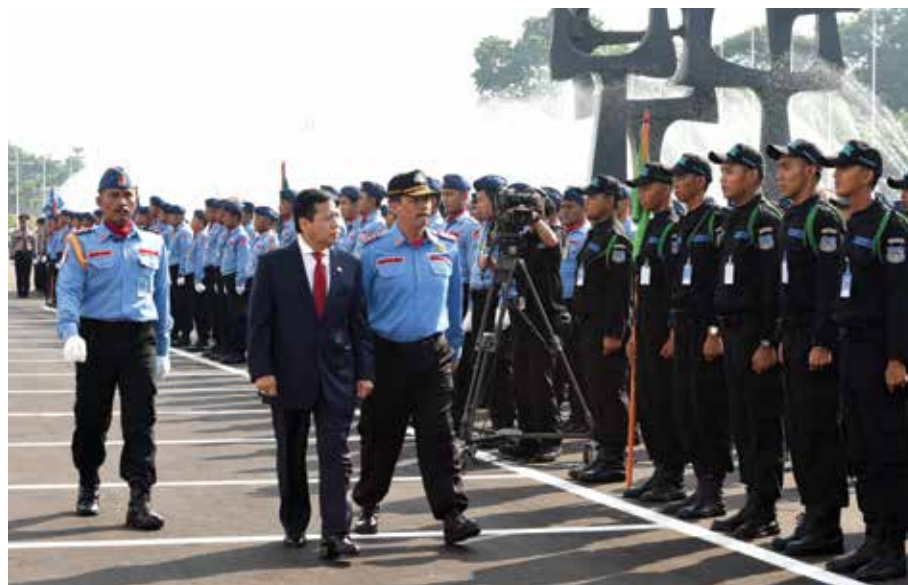
Novanto mengimbau, semua personil Pamdal dan semua personil ke-



Ketua DPR Setya Novanto

amanan, baik TNI maupun Polri yang terlibat dalam pengamanan objek vital negara, harus giat berlatih mengasah keterampilan diri dalam membantu pengamanan di lingkungan parlemen. “Siapkan mental dan fisik untuk ikut memberi pelayanan yang prima,” ujar Novanto dalam apel tersebut.

Pamdal juga diminta mampu mendeteksi dini setiap ancaman yang mengganggu keamanan lingkungan. Bahkan, Novanto juga menyerukan satuan Pamdal agar mengokohkan kerja sama pengamanan di lingkungan DPR, MPR, dan DPD. Usai apel digelar parade dan atraksi dari peserta apel. Atraksi yang dipertontonkan adalah baris berbaris, atraksi bela diri, atraksi deteksi ancaman bom, dan lain-lain. (MH), FOTO : EKA HINDRA, DENUS/PARLE/HR.



Ketua DPR memeriksa barisan dalam apel Pamdal DPR

KETUA DPR SAMBUT BAIK KERJA SAMA INDONESIA-CHINA



Ketua DPR Setya Novanto

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto menyambut baik realisasi kerjasama antara pengusaha Indonesia dan China dengan membuka pabrik-pabrik baru di Indonesia. Pembukaan pabrik baru ini akan mengurangi beban pemerintah di sektor tenaga kerja.

“Tentunya ini akan menekan angka pengangguran di

Indonesia,” kata Novanto, di gedung DPR RI, Jakarta Jumat (06/11/2015).

Setya Novanto menuturkan, pada tahun ini jumlah pengangguran di Indonesia terus meningkat. “Dari data bulan Agustus 2015 lalu diperkirakan mencapai tujuh juta pengangguran,” ujarnya.

Politisi partai Golkar ini mengungkapkan realisasi kerjasama Indonesia-Cina sebagai salah satu materi pembicaraan saat bertemu dengan Presiden Jokowi, pada Kamis kemarin. Menurutnya, hubungan kedua negara hingga hari ini semakin harmonis.

“Saya nilai hubungan ini justru sangat menguntungkan Indonesia,” ungkap Novanto.

Novanto berharap realisasi kerjasama antara pengusaha Indonesia-Cina terus terlaksana dengan munculnya pabrik-pabrik baru. Selain itu menurutnya pemerintah telah melakukan berbagai kemudahan investasi bagi para pengusaha yang akan menanamkan modal di Indonesia.

Tidak hanya itu, menurut dia, DPR siap membantu pemerintah meyakinkan para investor agar masuk ke Indonesia. Sehingga tidak perlu ada ketakutan untuk berinvestasi di Indonesia. “Saya jamin aman dan menguntungkan kedua belah pihak,” tegas Novanto. (AS), FOTO : DENUS/PARLE/HR.

Ketua DPR Sampaikan Selamat Kepada Penerima Gelar Pahlawan

Dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November 2015, Presiden Joko Widodo memberikan anugerah gelar Pahlawan Nasional kepada lima tokoh di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/11/2015). Pemberian gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2015.

Kelima tokoh yang mendapat gelar tersebut merupakan tokoh pergerakan nasional dari Sulawesi Utara, Bernard Wilhem Lopian, tokoh Jawa Timur Almarhum Mas Isman dan Almarhum Komjen Pol Moehammad Jasin, tokoh Bali Almarhum I Gusti Ngurah Made Agung serta tokoh Yogyakarta Almarhum Ki Bagus Hadikusumo.

Pimpinan DPR yang turut hadir dalam pemberian gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara yakni Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Agus Hermanto dan Fahri Hamzah.

Atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini, Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan selamat kepada pihak-pihak yang telah mendapatkan



Pimpinan DPR saat menjawab pertanyaan wartawan

penghargaan dalam rangka menyambut Hari Pahlawan.

“Tadi saat Rapat Konsultasi dengan Presiden, kami menyampaikan sela-

mat kepada pihak-pihak yang telah mendapatkan penghargaan dari Presiden,” kata Novanto. (SKRI), FOTO : DENUS/PARLE/HR.

KETUA DPR: PRESIDEN TIDAK GEGABAH RESHUFFLE KABINET



Pimpinan DPR menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta

Isu reshuffle Kabinet Kerja jilid II kembali ramai diperbincangkan, menanggapi hal tersebut Ketua DPR Setya Novanto se usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (05/11) menyampaikan bahwa *reshuffle* atau perombakan Kabinet Kerja jilid II merupakan hak prerogatif penuh Presiden. Namun, Setya Novanto mengatakan bahwa

DPR siap memberikan masukan kepada Presiden jika diminta.

“Kami siap membantu Presiden Joko Widodo untuk memberikan masukan dan evaluasi. Kita akan memberikan informasi-informasi evaluasi kalau Presiden minta masukan dan pertimbangan DPR,” ungkap Novanto.

DPR akan memberikan masukan berdasarkan kinerja kementerian dari pandangan komisi-komisi terkait. “Sudah menjadi tugas DPR untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah,” terang Novanto.

Novanto berharap, agar Presiden tidak gegabah dalam merombak kabinetnya. Sebab kondisi ekonomi saat ini belum stabil, sehingga perlu perhatian yang lebih di bidang ekonomi bila ingin merombak kabinet. Jangan sampai perombakan kabinet justru akan membuat kegaduhan politik dan tentu akan berdampak pada perekonomian nasional.

“Perombakan kabinet merupakan wewenang Presiden. Dan kita akan menunggu dan kita harus hati-hati karena perekonomian kita dalam keadaan low sehingga masih perlu perhatian-perhatian pemerintah. Kita berharap anggaran yang diberikan dan disetujui dapat benar-benar dilaksanakan agar penyerapan semakin baik,” ungkapnya.

Terkait pembangunan infrastruktur, Novanto menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang dinilainya memberikan dampak positif bagi investor asing. (SKR), FOTO : DENUS/PARLE/HR.

PIMPINAN DPR HADIRI RAPAT KONSULTASI DENGAN PRESIDEN

Pimpinan DPR mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk melakukan Rapat Konsultasi dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (05/11/2015). Hadir kelima Pimpinan DPR yakni Ketua DPR Setya Novanto dan empat Wakil Ketua DPR yakni Fadli Zon, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah.

Dalam keterangan persnya se usai pertemuan, Ketua DPR mengucapkan selamat kepada pihak-pihak yang mendapat penghargaan dalam rangka Hari Pahlawan pada 10 November nanti.

Ketua DPR Setya Novanto menjelaskan, ada beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan.

“Pertama kita tadi membicarakan masalah APBN 2016 yang baru saja disetujui DPR, APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat,” ungkap Setya Novanto.

Selain itu dibicarakan juga masalah Penyertaan Modal Negara (PMN), ini menjadi tanggung jawab bersama dan harus mencari jalan keluar bersama, Lebih lanjut Novanto menyampaikan bahwa PMN harus memperhatikan kepentingan yang lebih jauh dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan rakyat. “Terkait dengan masalah PMN itu sendiri akan dibahas oleh Komisi-Komisi



Pimpinan DPR usai Rapat Konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan

terkait pada saat pembahasan APBN Perubahan 2016,” katanya. (SKR), FOTO : DENUS/PARLE/HR.

JEPANG TETAP INGIN TINGKATKAN INVESTASI



Ketua DPR bersama Dubes Jepang Yauaki Tanizaki memberikan keterangan pers di DPR Senayan Jakarta

Pemerintah Jepang tetap ingin meningkatkan investasinya di Indonesia. Kerja sama di semua lini pun akan ditingkatkan. Apalagi, kini pemerintah Indonesia telah mempermudah izin investasi asing. Ini sangat menarik bagi Jepang. Walau sempat kecewa karena tak terpilih sebagai inves-

tor kereta api cepat Jakarta-Bandung, Pemerintah Jepang tetap pada komitmennya untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia jauh lebih baik lagi. Demikian mengemuka dalam perbincangan antara Dubes Jepang Yauaki Tanizaki dengan Ketua DPR RI Setya Novanto di DPR, Kamis (5/11).

Novanto usai pertemuan mengatakan, Jepang ingin terus berinvestasi terutama di sektor transportasi dan infrastruktur. Dan hubungan kerja sama ini akan diperluas lagi ke sektor pertahanan dan ekonomi. Tidak hanya itu, kerja sama kedua parlemen juga kian dipererat. Hubungan ini, kata Novanto, sangat berarti bagi kedua pemerintahan maupun parlemen.

Dalam kesempatan tersebut, Novanto juga menyampaikan rencananya untuk berkunjung ke Jepang pada 9 November ini. Di Jepang, Novanto diagendakan akan bertemu dengan para pemimpin Jepang, yaitu Kaisar, Ketua Parlemen, dan Pemimpin Politik Jepang. Selain untuk mempererat hubungan parlemen, pertemuan juga akan membicarakan nilai investasi di kedua negara.

Sementara itu, Dubes Jepang menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik perlu saling bertemu antara pemimpin kedua negara. Jepang sendiri mengakui, walau kini ekonomi Indonesia sedang melemah, tapi kelak akan kembali sehat dan meningkat. Indonesia tetap menjadi mitra penting dalam berinvestasi. (MH), FOTO :

DENUS/PARLE/HR.

Keterlibatan Parlemen Penting Capai Pembangunan Berkelanjutan

Panitia Kerja (Panja) Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menekankan pentingnya keterlibatan parlemen dalam mendukung suksesnya pencapaian TPB ke depan.

Demikian dikatakan Ketua Panja TPB, Nurhayati Ali Assegaf saat menyampaikan sambutan dalam workshop Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang digelar di Bappenas, Jakarta, Selasa (10/11).

Acara ini diikuti peserta dari berbagai kementerian/lembaga dan juga dari perwakilan LSM yang bergerak dalam isu-isu pembangunan. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil hadir memberikan pidato kunci terkait pelaksanaan TPB kedepan.

“Agenda yang patut mendapat perhatian adalah pendidikan yang berkuali-

tas. Dengan pendidikan tersebut kita dapat mencetak generasi-generasi kreatif untuk mendukung pembangunan negara. Ke depan, mari kita bekerja bersama-sama untuk TPB,” pesan Sofyan.

Lebih lanjut Nurhayati menjelaskan, TPB dirumuskan melalui proses yang sangat partisipatif dan *bottom-up* tidak lagi seperti pendahulunya yakni MDGs. “Sehingga paradigma pembangunan global ke depan adalah sangat partisipatif, melibatkan semua pihak termasuk parlemen,” urainya.

Dia menggaris bawahi signifikansi keterlibatan parlemen telah termaktub dalam deklarasi KTT Dunia yang digelar belum lama ini yang dinamai *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Dokumen tersebut secara eksplisit



Ketua Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nurhayati Ali Assegaf

menyebut parlemen penting dalam aspek *means of implementation* (paragraf 45), keterlibatan komprehensif parlemen (paragraf 52), dan *regular and inclusive review of progress* (paragraf 79).

“Parlemen sangat penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Ber-

kelanjutan. Kami adalah jembatan aspirasi antara masyarakat kepada para pembuat kebijakan. Kami adalah pendorong kebijakan baik legislasi maupun anggaran untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Parlemen, sambung Nurhayati, sejalan dengan perannya mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, pro-aktif menggalang kerjasama antar-parlemen untuk mensukseskan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke depan.

Nurhayati yang juga Ketua BKSAP

DPR menuturkan, Panja SDGs merupakan kelanjutan dari Panja MDGs yang dibentuk sejak tahun 2010. Panja berkontribusi menyeluruh dalam beragam pelaksanaan MDGs dan ke depan terkait SDGs. “Dalam konteks anggaran misalnya, anggaran pendidikan kami setuju 20% yang tentu dapat mendukung pencapaian MDGs,” urainya.

Panja juga melakukan rangkaian upaya diplomasi parlemen melalui keterlibatannya di beragam forum internasional termasuk di UN High Level Meeting maupun di Inter-Parliamen-

tary Union (IPU). Dari beragam forum tersebut, panja mendapatkan beragam informasi mengenai keterlibatan parlemen dalam isu-isu SDGs di negara lain.

“Seperti di Parlemen Hungaria ada National Council on Sustainable Development yang melibatkan parlemen ataupun memiliki Komisi khusus terkait Sustainable Development. Panja TPB maupun bentuk-bentuk lain yang ada di parlemen negara lain menunjukkan tingginya fokus parlemen dalam isu SDGs,” terang Nurhayati. (BKSAP,MP), FOTO : DOK/PARLE/HR.

KUALITAS KOMUNIKASI UNTUK PERSONAL BRANDING



Suasana Orientasi Staf Anggota DPR dengan tema Personal Branding

Komunikasi merupakan bagian penting dari *personal branding* seseorang. Tata berkomunikasi dan kualitas isi komunikasinya sendiri menunjukkan

identitas diri. Di dunia politik, komunikasi sangat menentukan dalam meraih simpati publik.

Inilah materi lanjutan yang diberikan kepada para peserta orientasi staf anggota DPR RI oleh para konsultan pengembangan diri. Vivi Herlambang dan Puspita Zorawar tampil memberi banyak masukan materi penting kepada para staf anggota DPR, Kamis (12/11). Di lembaga politik seperti DPR, kualitas komunikasi para staf ikut mempengaruhi citra para anggota termasuk institusinya.

Prinsip dasar komunikasi, kata Vivi, bagaimana bisa diterima oleh orang lain. Untuk itu, tutur yang ramah dan berkualitas sangat menentukan daya terima pihak lain. Sementara itu, Puspita Zorawar menjelaskan, kesuksesan bisa berasal dari kepercayaan orang lain. Dan membangun kepercayaan itu butuh *personal branding* yang baik.

Banyak orang sukses justru atas rekomendasi orang lain di lingkungan kerjanya. Rekomendasi mengantarkan ke puncak karir politik dan pekerjaan, karena orang yang direkomendasikan memang *personal branding*-nya sangat positif. Di sinilah pentingnya menjaga komunikasi dan *personal branding* di lingkungan kerja.

Dyah Mentari Putri, peserta orientasi ini menyambut positif materi pembekalan yang disampaikan dua narasumber. *Personal branding*, kata Dyah, bisa dipelajari dari lingkungan. “Kita bisa belajar dari mereka yang telah berhasil, tetapi jangan meniru brandnya. Bila kita meniru, kita hanya akan dianggap sebagai plagiat atau *just another someone*,” seraya menambahkan, “Brand harus mencerminkan karakter, nilai, dan visi. Misi pribadi dari *personal brand* ini harus diselaraskan dengan ambisi.” (MH)

FOTO: JAKA/PARLE/IW

KEPALA DAERAH DIMINTA TAK LAKUKAN MUTASI JELANG PILKADA

Komisi II DPR RI meminta kepada Kepala Daerah untuk tidak membuat keputusan yang bisa berakibat kegaduhan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.

“Jangan coba-coba melakukan atau memutasikan pejabat karena ini berpengaruh terhadap calon-calon tertentu. Jangan coba-coba aparat sipil negara untuk memenangkan calon tertentu,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman, saat menggelar rapat dengan jajaran Pemda Provinsi



Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman saat rapat dengan Pemprov Sumut beserta jajarannya

Sumatera Utara (Sumut), Polda Sumut, Ketua KPU Provinsi Sumut, Bawaslu Provinsi Sumut, di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (11/11/2015).

Ia juga meminta kepada KPU Provinsi Sumut dan Bawaslu Provinsi Sumut untuk lebih ketat mengawasi adanya KTP ganda.

“Jangan ada mobilisasi perpindahan

masyarakat dan juga permintaan KTP baru sebab untuk pembuatan KTP terakhir tanggal 1 Maret batas akhirnya,” kata politisi Partai Golkar itu.

Selain itu juga, Komisi II DPR RI mempertanyakan persiapan dan kesiapan Polda Sumut, KPU Provinsi Sumut, Bawaslu Sumut serta kabupaten/kota yang akan mengikuti pilkada tanggal 9

Desember 2015.

Sementara itu, untuk pengamanan Pilkada serentak di 23 kabupaten/kota, Polda Sumatera Utara sudah mempersiapkan sebanyak 12.221 dan BKO 2 SKK dari Brimob Aceh serta 578 personil TNI. (ASI) FOTO: AGUNG/PARLE/HR

PERSONAL BRANDING PENTING DIPERHATIKAN



Konsultansi Personal Branding Puspita Zorawar

Personal branding (citra diri) sangat penting dimiliki setiap pribadi. Citra positif ini yang harus disampaikan kepada lingkungan kerja bahwa seseorang

sangat tepat berada di posisinya. Dengan *personal branding* yang terjaga, kepercayaan publik pun kian tinggi.

Ini adalah salah satu materi pembekalan yang disampaikan oleh konsultan pengembangan diri Puspita Zorawar kepada para staf administrasi anggota DPR RI, Rabu (11/11). Bekerja di lembaga politik seperti DPR, *personal branding* begitu penting untuk pencitraan publik. Di hadapan masyarakat pemilih di dapilnya, seorang staf harus merepresentasikan citra seorang anggota DPR yang memang layak terpilih.

Personal branding yang dimiliki para staf anggota tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi citra DPR sebagai lembaga. Untuk itu, tata krama, penampilan berbusana, dan tutur kata perlu dibangun sebagai pencitraan diri sekaligus pencitraan institusinya. Para staf anggota terlihat antusias mengikuti materi pembekalan ini.

Selain materi pengembangan diri, materi normatif seperti pengenalan lembaga DPR dan pola hubungannya dengan Sekretariat Jenderal DPR juga diperkenalkan oleh Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti. Dalam kesempatan terpisah, Sekjen menyampaikan tentang visi misi, sejarah singkat, dan persoalan aktual Sekretariat Jenderal DPR.

Safira Yuliansyah, salah satu peserta orientasi berkomentar, *personal branding* merupakan cermin tentang diri sendiri. *Personal branding* juga menjadi kunci sukses para pekerja. “*Personal branding* menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibangun, diciptakan, dan dikelola seoptimal mungkin. Tentu ada nilai tambah yang dihasilkan dengan menjaga *personal branding*,” tutur Safira, sapaan akrab staf anggota ini. (MH)

FOTO: JAKA/PARLE/HR

SETJEN DPR GELAR SOSIALISASI KEARSIPAN

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Rabu (11/11) menggelar acara sosialisasi kearsipan dengan menghadirkan nara sumber Kepala Pusat Akreditasi Arsip Nasional RI (Anri) Rudi Anton. Menurut Kepala Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Rahayu Setya Wardani, acara ini dimaksudkan untuk menata ulang dan mendokumentasikan dokumen negara yang dihasilkan DPR.

Dengan demikian, sewaktu-waktu ada masalah atau diperlukan, Setjen DPR bisa segera menyiapkan. Disamping itu ada UU yang mengatur bagaimana menata dan menyusun dokumen serta ada sanksi kalau tidak menyampaikan dokumen tersebut.

Ia menyatakan sependapat dengan Kepala Pusat Akreditasi



Suasana sosialisasi kearsipan Setjen DPR di Ruang Rapat Komisi IV DPR

Arsip Nasional RI (ANRI) Rudi Anton yang menyebut arsip DPR sangat strategis. Karena itu lanjut Rahayu, Setjen DPR selalu melakukan koordinasi sebab setiap kegiatan pengarsipan ada mekanisme dan peraturannya.

Setjen DPR, kata Rahayu, sedang menata ulang, sebab dokumen yang dikeluarkan penting sekali. Makanya pelan tapi pasti harus memperbaiki pengelolaan arsip di DPR. Untuk itu kerja sama dengan ANRI masih ada kelanjutannya, sebab pertemuan seperti ini untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada semua pejabat maupun pegawai bagaimana pentingnya dokumen dan arsip sehingga bila sewaktu-waktu memer-

lukan tidak mengalami kesulitan.

Rudi Anton dalam salah satu kesimpulan paparannya menegaskan, pengelolaan arsip dinamis, sejak awal penciptaan sampai dengan penyusutan, harus sedemikian terkontrol melalui pengelolaan yang prosedural, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pencipta maupun pengelolanya. (MPI)/FOTO: DENUS/PARLE/IW.

Komisi V Pertanyakan Masih Banyaknya Perlintasan KA Tanpa Penjaga



Tim kunjungan kerja Komisi V DPR berdialog bersama Pejabat PT KAI di Yogyakarta

Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti mempertanyakan masih banyaknya pelintasan kereta api (PA) tanpa adanya petugas. Kondisi ini dinilai rawan dan membahayakan, sebab kasus-kasus kecelakaan di pelintasan KA masih cukup tinggi.

Hal itu dikatakannya di sela-sela kunjungan kerja Komisi V DPR baru-baru ini ke Yogyakarta. Selain me-

ninjau lokasi pembangunan bandara Kulon Progo, Komisi yang membidangi infrastruktur ini meninjau stasiun KA Tugu, Embung Langensari, kantor Basarnas, BMKG dan Bandara Adisutjipto.

Berdasarkan data Direktorat Perkeretaapian Kemenhub, ada sekitar 8.500 palang pintu pelintasan KA yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru sekitar

2.500 atau sekitar 29 persen yang dijaga, baik resmi maupun tak resmi. “Berarti masih terdapat 6 ribu pelintasan KA, atau sekitar 71 persen yang masih belum berpaling pintu,” ungkapnya.

Masalahnya, kata pejabat PT KAI yang mendampingi Tim Komisi V, kalau setiap pelintasan 4 orang penjaga maka untuk menjaga pintu pelintasan perlu 24.000 orang. “Rasanya nggak mungkin untuk memenuhi pegawai sejumlah itu, makanya selalu dijalin kerja sama antara PT KA dengan Pemda untuk *sharing*. Dan secara undang-undang kewajiban Pemda bukan PT KAI,” jelasnya.

Ditambahkan, pertumbuhan jumlah pelintasan KA tidak resmi mencapai 10%. Seperti terjadi di Permata Hijau sudah ditutup, lalu muncul hunian baru disusul jalan setapak motor dan mobil lewat. Karena itu sesuai kebijakan Pimpinan PT KAI, maka disteril dengan pembangunan pagar. Diakui, kecelakaan KA di pelintasan masih selalu ada, tapi jumlahnya menurun karena kesadaran masyarakat yang kian meningkat. (MPI)/FOTO: MASTUR/PARLE/IW.

KUALITAS DAN KAPASITAS APARAT DESA HARUS DITINGKATKAN

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan, peningkatan kapasitas dan kualitas kemampuan aparatur desa adalah sangat utama dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa sehingga terlaksana dengan baik.

“Kapasitas dan kualitas pemerintahan desa harus dibangun sejak awal, agar ti-

dak sia-sia kebijakan yang dilakukannya, oleh karena itu perlu kehadiran negara dalam setiap persoalan masyarakat,” kata Rambe, Selasa (10/11/2015), usai memberikan pengarahan sekaligus memotivasi aparatur desa se-Sumatera Utara.

Menurutnya, kapasitas pemerintahan desa perlu ditingkatkan karena peme-

rintahan desa adalah bagian dari pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah juga bagian dari pemerintahan nasional yang merupakan pemerintahan secara keseluruhan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu meningkatkan kapasitas kemampuan, dan kapasitas lainnya dari aparatur desa adalah hal yang sangat



Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman

penting.

Hal yang perlu ditingkatkan adalah upaya melakukan perencanaan pembangunan di desa, perencanaan yang akan dibahas dalam musrenbang di masing-masing daerah, termasuk dalam mengeluarkan produk hukum desa dalam bentuk peraturan desa. Selain itu upaya meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam pembangunan nasional.

Pembangunan desa yang diharapkan adalah pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan kualitas kehidupan yang

semakin baik.

“Pembangunan nasional ini bukan hanya membuat jalan, tapi juga membangun karakter sumber daya manusia seutuhnya, sekaligus juga upaya dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa terlaksana dengan baik, dan meningkatnya kualitas pembangunan desa,” tuturnya.

Rambe juga mengungkapkan masih ditemukan kesulitan yang dihadapi oleh aparat desa dalam perencanaan, dengan aturan-aturan yang sangat rijit dan detail. (AS) FOTO: DENUS/PARLE/HR

KOMISI VII TAGIH JANJI PEMBANGUNAN PLTB SAMAS, BANTUL

Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan lapangan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Samas Bantul, Yogyakarta, Selasa (10/11/2015).

Ketua Komisi VII Kardaya Warnika, yang memimpin langsung kunjungan lapangan ke PLTB Samas Bantul mengungkapkan bahwa kedatangan mereka untuk memantau persiapan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu berkapasitas 50 MW di pesisir selatan Bantul.

Proyek PLTB dikembangkan oleh *Independent Power Producer (IPP) internasional UPC Renewables Indonesia* bekerjasama dengan perusahaan nasional PT Binatek Energi Terbarukan. PLTB Samas Bantul berkapasitas 50 MW akan menjadi PLTB skala besar pertama di Pulau Jawa dan pertama di Indonesia. Pembangunan proyek PLTB akan dimulai pada 2016 dan beroperasi pada 2017.

“Kita ingin melihat bukti bukan janji, kita ingin membuktikan sudah dibikin atau belum, apakah janjinya sesuai buktinya, kita berharap proyek ini akan bisa direalisasikan dengan baik dan cepat, sehingga baik bagi Yogya, Indonesia, dan semuanya,” ungkapnya.



Tim Kunker Komisi VII DPR meninjau lapangan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Samas Bantul, Yogyakarta

Politisi Partai Gerindra ini sampaikan, Komisi VII memandang bahwa pengembangan energi terbarukan merupakan suatu impian karena akan menyelamatkan Indonesia dari ketergantungan energi bahan bakar fosil yang semakin langka.

Selain itu PLTB akan menjadi pembangkit listrik yang aman, ramah lingkungan dan tanpa menimbulkan polusi udara sehingga bisa mengurangi dam-

pak pemanasan global.

Kardaya berharap, proyek PLTB segera direalisasikan agar permasalahan listrik di Yogya bisa teratasi. “Tentu, proyek PLTB Samas Bantul jika berhasil akan menjadi daerah percontohan di Indonesia untuk pengembangan PLTB. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi dan angin yang stabil untuk dikembangkan PLTB,” terangnya. (SKR),

FOTO: SINGGIH/PARLE/HR.

RUU MINOL UNTUK MENGATUR DISTRIBUSI DAN KONSUMSI MIRAS

Ketua Pansus RUU Minuman Beralkohol (Minol) H. Arwani Thomafi menegaskan bahwa dengan RUU Minol yang akan melarang dan mengendalikan peredaran minuman keras tersebut tidak akan menutup pabrik-pabrik yang selama ini memproduksi minuman keras. RUU ini hanya mengatur dis-

tribusi dan konsumsi Miras agar tidak dilakukan di sembarang tempat, yang bisa membahayakan bagi tindak kejahatan dan anak-anak.

“Dengan RUU Minol ini tak ada penutupan pabrik Miras, dan ada pengecualian seperti untuk industri, farmasi, dan



Ketua Pansus RUU Minuman Beralkohol (Minol) H. Arwani Thomafi dalam diskusi RUU Minol

pariwisata, atau mungkin di hotel tertentu dan sebagainya. Bahwa RUU ini hanya untuk mengantisipasi meningkatnya kriminalitas akibat Miras dan negara hadir untuk melindungi, mengayomi, menjamin keamanan, ketenangan dan ketertarikan masyarakat,” tegas Arwani Thomafi dalam diskusi RUU Minol bersama Ketua Gerakan Nasional Miras (GeNAM) yang juga anggota DPD RI Fahira Idris, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, dan Anggota dari ICJR di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (10/10/2015).

Karena itu kata politisi PPP itu, DPR tidak ingin RUU Minol ini hanya menjadi tumpukan kertas, melainkan untuk memberikan sumbangsih kepada negara dalam melindungi keamanan masyarakat dari tindak kriminal, kejahatan, dan dampak negatif lainnya serta tetap hidup sehat. “DPR pun sudah berkomunikasi dengan kepala daerah terkait Perda-Perda yang melegalkan Miras, sehingga mereka akan memiliki payung hukum lebih kuat lagi dengan RUU Minol ini,” ujarnya.

Pembahasan RUU Minol ini akan dimulai pada pertengahan November 2015 mendatang sampai Januari 2016 dengan melibatkan berbagai stakeholder dari unsur kesehatan, agama, hukum, pemuda, pengusaha, industri dan pemerintah. “Pada prinsipnya kita melarang untuk semua aspek Miras baik produksi, distribusi dan konsumsi, kecuali untuk kepentingan farmasi, pariwisata, dan kepentingan masyarakat terbatas (adat). “Dari Miras yang mengandung 1 persen sampai 5 persen, 5 persen hingga 20 persen, 20 persen sampai 55 persen dan minuman tradisional termasuk oplosan-campuran (racikan) dan sebagainya.

Fahira Idris menyambut positif RUU Minol ini, karena dengan tegas akan memberikan perlindungan dari bahaya Miras khususnya bagi anak-anak. Mengingat dalam kajian GeNAM kerjasama dengan Pusat Kajian Kriminologi UI, di berbagai Lapas di Indonesia sebanyak 39 persen anak-anak melakukan kejahatan akibat pengaruh Miras. “Bahkan di Cipinang Jakarta sampai 70 persen akibat Miras,” tambahnya.

Dengan RUU Minol ini lanjut Fahira, maka RUU ini mempersempit ruang gerak produsen, distributor, dan konsumen Miras. “Anak-anak banyak terjerumus ke Miras selama ini karena Miras memang dekat dengan mereka. Di mana Miras dijual bebas dan sembarang tempat termasuk supermarket. Apalagi dengan sanksi penjara antara 2 tahun – 15 tahun, dan denda Rp 10 juta sampai Rp 1 miliar. “Jadi, RUU Minol ini makin menjauhkan Miras dari anak-anak, sama halnya aturan yang berlaku di luar negeri,” jelasnya.

Tulus Abadi menegaskan jika barang yang bercukai memang seharusnya tidak dijual secara bebas, tapi di Indonesia termasuk rokok malah dijual bebas. Setiap barang yang dikenakan cukai seperti rokok dan Miras memang tidak boleh dijual bebas seperti di luar negeri. Pajaknya pun harus dikembalikan ke masyarakat untuk kesehatan, bukan untuk yang lain, karena rokok dan Miras berdampak negatif kepada masyarakat.

“Prostitusi pun di Amerika Serikat dikenai cukai. Juga dilarang melakukan promosi dan iklan. Namun, di Indonesia malah ditabrak dan semua bebas. Itu artinya tidak ada penegakan hukum yang konsisten (law enforcement). Padahal, larangan itu sudah merupakan deklarasi dunia atau *universal declaration*. Jadi, RUU ini jangan sampai menjadi macan kertas,” ungkapnya.

Menyinggung suatu budaya atau adat yang akrab dengan Miras tersebut kata Tulus Abadi, yang namanya budaya kalau memang buruk, negatif, merusak dan merugikan masyarakat itu sendiri, maka seharusnya adat dan budaya itu harus kita rubah dengan yang lebih baik. Seperti halnya tradisi mata-dor, yang sudah ratusan tahun di Spanyol, ternyata sekarang dilarang karena berbahaya. “Maka tidak ada masalah dengan budaya,” katanya.

Sementara itu Anggota menilai dengan RUU ini berarti DPR RI mengurangi kekuasaan kehakiman (pengadilan). Apalagi dengan RUU ini tanpa diikuti kajian yang komprehensif seperti analisis mengenai untung-ruginya bagi masyarakat luas (cost benefit). Selain itu sudah ada aturan di KUHP. “Hukum pidana itu pun tidak mengenal geografis. Seperti kalau di Papua, Bali, Batak diperbolehkan Miras. Seharusnya UU itu berlaku umum,” tambahnya. (NT/SC)/FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

PESAN BUNG HATTA BERKUMANDANG DI DPR

Pesan para tokoh bangsa menjadi bagian dari rangkaian prosesi upacara Peringatan Hari Pahlawan di halaman Setjen DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (10/11/15). Salah satu pesan yang berkumandang adalah dari Mohammad Hatta tokoh Proklamator RI.

“Pahlawan yang setia itu berkorban bukan untuk dikenal

namanya tapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara tergantung bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian maka Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntai pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini jika bangsa sendiri gemar memperdaya saudara sebangsa dan mencuri kekayaan ibu pertiwi,” demikian bunyi pesan yang disampaikan petugas upacara.

Pesan Pahlawan Nasional lain juga bergema di tengah upacara yang diikuti oleh pegawai kesetjanaan, DPR, DPD dan MPR diantaranya Nyi Ageng Serang dan Jenderal Besar Sudirman. Peserta upacara menyimak dengan khidmat setiap pesan termasuk Pembina Upacara, Sekjen MPR RI Edi



Suasana upacara Peringatan Hari Pahlawan di halaman Setjen DPR Senayan Jakarta

Siregar.

Turut hadir dalam upacara Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto, Kepala Badan Keahlian dan para deputi di lingkup kesetjanaan. Dalam kesempatan tersebut pembina upacara menyampaikan pentingnya sinergi tiga kesetjanaan pada saat semakin tergerusnya nilai kebersamaan di tengah-tengah bangsa.

Sementara Sekjen DPR menyampaikan pentingnya para pegawai membangun semangat kompetisi untuk memberikan layanan terbaik bagi anggota dewan. “Sebagai pendukung teknis administrasi dan keahlian bagi anggota parlemen, mari kita tumbuhkan kesadaran siap berkompetisi, tingkatkan kapasitas siap bekerja keras dan bekerja cerdas,” demikian Win. (IKY), FOTO: JAKA

NUGRAHA/PARLE/HR.

IRONIS, 238 DUSUN DI DIY BELUM BERJARINGAN LISTRIK

Dalam Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015 – 2016 Komisi VII DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke DIY. Tim Kunker Komisi VII diterima oleh Sekretaris Daerah DIY Ichsanuri beserta jajaran SKPD di lingkungan Pemda DIY di Gedung Pracimasono, Kepatihan Yogyakarta pada Senin (09/11/2015).

Ketua rombongan Kardaya Warnika, menyampaikan bahwa kunjungan ke DIY dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan-perkembangan yang terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi di DIY.

Menurutnya ada beberapa hal yang spesifik yang ingin diketahui secara langsung adalah mengenai sistem ketersediaan energi, terutama BBM seperti Gas, LPG, minyak tanah. Selain itu Tim juga ingin mendengarkan program konversi minyak tanah ke gas atau LPG yang bukan merupakan tujuan akhir konversi ini. Selain itu tim juga ingin mengetahui tentang masalah kelistrikan, khususnya apakah masih terjadi pemadaman yang bergilir dan bagaimana penanganan masalah limbah di perkotaan baik limbah B3 maupun sampah.

Dalam kesempatan tersebut dipaparkan pula mengenai kebijakan energi daerah dan kondisi pertambangan

di DIY oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Rani Sjamsinarsi.

Rani Sjamsinarsi pada paparannya menyatakan bahwa rasio elektrifikasi DIY per Juli 2015 di DIY mencapai 86,28 persen.

“Warga yang tercatat belum berlistrik ini sebenarnya sudah merasakan aliran listrik namun tidak bermeteran sendiri. Untuk itu, Pemda DIY mengusulkan perlunya peninjauan kembali pemakaian rumus penghitungan rasio elektrifikasi secara nasional agar dapat memberikan gambaran rasio elektrifikasi yang sebenarnya,” papar Rani.

Rasio elektrifikasi saat ini dihitung dengan jumlah Rumah Tangga berlistrik (pelanggan) dibagi jumlah Rumah tangga total, dirubah menjadi jumlah Rumah Rangka menikmati listrik dibagi jumlah Rumah Tangga total.

Rani juga jelaskan bahwa terdapat 238 Dusun di Yogyakarta yang belum berjaringan listrik resmi.

Menanggapi data yang disampaikan Pemda DIY, Anggota Komisi VII Dapil DIY Agus Sulistyono mengatakan bahwa masih adanya 238 dusun di DIY yang belum berjaringan listrik resmi menjadi suatu ironi bagi DIY.

Agus mengaku kaget dengan adanya data Pemda DIY yang menyebutkan masih adanya 4,6 persen dari 5.122 dusun di DIY yang belum seluruh war-



Anggota Komisi VII Dapil DIY Agus Sulistyono

ganya memiliki jaringan listrik. “Untuk itu, Komisi VII mendesak agar pemda DIY dan kabupaten proaktif mengupayakan agar 2 tahun ke depan seluruh warga mendapatkan sambungan jaringan listrik. Misalnya melalui program listrik desa untuk rumah tangga keluarga tidak mampu,” ungkap Agus.

“Setahun atau dua tahunlah terselesaikan dengan elektrifikasi. Menurut saya ironi di Yogyakarta ada 238 dusun yang belum teraliri listrik walaupun hanya ada 10 kepala keluarga tapi jumlah ini kalau ada orang luar tahu ini luar biasa. Tugas saya mendorong paling tidak 2 tahun kedepan sudah terselesaikan,” tegas Agus. (SKR), FOTO : SINGGIH/PARLE/HR.

OKKY ASOKAWATI GELAR PENGOBATAN MASSAL

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menggelar pengobatan massal bagi masyarakat korban musibah kebakaran di RW 08 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Pengobatan gratis ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga setempat.

Berlokasi di kawasan padat penduduk di bilangan Kramat Sentiong, Selasa (10/11), warga berduyun-duyun mendatangi lokasi pengobatan massal. Selain korban kebakaran, anggota Majelis Taklim Khairun Nisa, dan warga lanjut usia (lansia) juga mendapat prioritas pengobatan gratis ini.

Syahrianti, seorang ibu pengurus RW dan majelis taklim setempat mengatakan, apa yang dilakukan oleh Okky Asokawati sebagai Anggota DPR sangat mulia. Okky, aku Syahrianti, begitu peduli pada warganya. Saat waktu meres tiba, lanjut ibu paruh baya itu, Okky tak pernah lupa memanfaatkan waktunya untuk memberi perhatian lebih kepada masyarakat.

“Dia sering turun ke masyarakat. Kalau memberi penjelasan tentang kesehatan kepada ibu-ibu pengajian di sini, bahasanya selalu mudah dicerna. Dia juga sangat ramah dan peduli,” ucap Syahrianti. Setidaknya ada 100 lebih pasien yang datang ke lokasi pengobatan massal ini. Pasiennya didominasi kaum ibu dan lansia.



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati dalam acara pengobatan massal

Hertini, lansia yang mendapat pengobatan gratis ini merasa bahagia bisa mendapat terapi gratis atas penyakit lambung yang dideritanya. “Saya baru kenal ibu Okky di sini. Ia anggota dewan yang sangat baik dan ramah.”

Sebelumnya, Okky sendiri sempat meninjau lokasi kebakaran yang memusnahkan sekitar 15 rumah. Ada 45 KK yang tinggal di kawasan tersebut. Dan sebagian besar warga yang mengalami musibah kebakaran itu adalah pedagang. Okky coba memberi empati sebagai tanggung jawab sosialnya yang ia emban. Okky adalah Anggota Fraksi PPP DPR dari dapil DKI II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri). Setiap kali meres, Okky tak pernah absen mendatangi warga di dapilnya itu. (MH), FOTO: JAKA NUGRAHA/PARLE/HR.

SEKJEN DPR BUKA ORIENTASI STAF ADMINISTRASI



Sekjen DPR Winantuningtyastiti membuka Orientasi Staf Administrasi Anggota DPR

Keberadaan para Staf Administrasi Anggota DPR RI sangat dibutuhkan sebagai daya dukung kinerja anggota maupun DPR sebagai institusi. Inilah yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti saat membuka acara Orientasi Staf Administrasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019.

Acara yang berlangsung di ruang Pustakaloka, Selasa (10/11), diikuti 1.030 Staf Administrasi Anggota atau yang lebih dikenal dengan Aspri (asisten pribadi). Kerja para Anggota DPR tidak ringan. Selain membutuhkan data administrasi, para anggota dewan juga membutuhkan berbagai rujukan literatur dan anggaran untuk menunjang kinerjanya sebagai wakil rakyat. Dalam konteks ini, peran Aspri menjadi sangat penting dan strategis melancarkan semua kebutuhan anggota.

“Keberadaan Staf Administrasi penting untuk mendukung fungsi anggota yang bekerja tidak ringan,” ujar Win dalam sambutan pembukaan orientasi tersebut. Apalagi, saat ini DPR sedang menguatkan tekad menuju parlemen modern. Akses teknologi dan transparansi terus ditingkatkan. Dan para Aspri harus mampu memahami perannya di tengah kebutuhan membangun parlemen modern tersebut.

Selain itu, daya dukung para Aspri sangat dibutuhkan bagi anggota yang ingin mengajukan anggaran pembangunan bagi daerah pemilihannya. Data kebutuhan pembangunan dapil tentu harus disesuaikan dengan program pemerintah. Kelengkapan administrasi lagi-lagi menjadi keniscayaan yang harus dilakukan para Aspri untuk pengajuan anggaran pembangunan dapil.

Acara orientasi ini berlangsung selama dua hari. Banyak materi yang akan diberikan kepada para Aspri, diantaranya

materi kepribadian dan materi peraturan yang berlaku di DPR. “Para Aspri harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin orientasi ini, bagaimana harus bersikap dan bekerja dengan baik,” harap Win, seraya menambahkan, acara ini juga harus disambut dengan semangat dan dijadikan sebagai forum silturahmi dengan para pejabat Setjen DPR.

Ditambahkan Win, ada simbiosis mutualisme antara pejabat dan pegawai Setjen DPR dengan para Aspri anggota. Saling dukung merupakan citra bersama dari lembaga ini, agar kerja dan tanggung jawab para anggota DPR juga semakin baik di hadapan publik. (MH) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/OD

MASYARAKAT HARUS MENIKMATI KEMAJUAN KULON PROGO

Keputusan Pemerintah yang akan segera membangun bandara Internasional Kulon Progo Yogyakarta harus membawa dampak positif bagi masyarakat. “Bagi saya masyarakat harus mendapatkan ganti untung, bukan ganti rugi. Artinya kehidupan mereka harus lebih baik,” ungkap anggota Komisi V DPR Yoseph Umarhadi berkaitan akan segera dimulainya proses pembangunan Bandara Kulon Progo, belum lama ini di Yogyakarta.

Menurut Yoseph, masyarakat Kulon Progo juga harus dilibatkan. “Mereka jangan sampai hanya jadi penonton. Mereka juga harus dilibatkan dalam kemajuan Kulon Progo dan bisa menikmati dampak positif dari pembangunan ekonomi di situ, apakah karyawan atau pegawai Angkasa Pura, pedagang, pengusaha travel maupun usaha lainnya.

Pembangunan Bandara Sipil Kulon Progo merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Pasalnya, kata Yoseph, Bandara Adisutjipto yang ada sekarang merupakan bandara milik TNI AU. Padahal semakin lama Yogya sebagai daerah tujuan wisata dalam negeri maupun mancanegara kian meningkat, diperkirakan 20 juta wisatawan akan datang ke Yogyakarta.

“Kita tidak ingin pendidikan penerbang di Yogya terganggu karena frekuensi penerbangan di Adisutjipto makin besar. Pindahan ke bandara Internasional Kulon Progo merupakan suatu kebutuhan supaya masyarakat dapat memahami dan mendukung. Memang terkait pindahan itu akan ada korban sebab mau tidak mau harus memilih tempat kosong yang kini makin terbatas.

“Lokasi itu bagus, ideal. Bandara harus menghindari sesedikit mungkin tumpang tindih. Disitu rendah dan dipinggir pantai disitu. Bukan soal penerbangannya tetapi ketersediaan lahan sebagian besar milik masyarakat dan kita himbau dengan besar hati melepaskan lahannya dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kesesuaian harga. Jangan sampai pindahan membuat kehidupan mereka makin sengsara. Harus dicari lokasi sesuai penghidupan sebelumnya,



Tim Kunker Komisi V DPR saat meninjau lokasi pembangunan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta

bila petani maka lahan penggantinya juga harus bisa bercocok tanam lagi,” jelas dia.

Tak kalah penting menyiapkan mental, budaya, kesiapan secara sosial tradisi. Masyarakat Kulon Progo biasanya tradisional, tiba-tiba ada pembangunan modern. Maka kesiapan mental terhadap masuknya budaya modern harus dilakukan. Banyak investor yang berminat dari Jepang, Korea dari Cina untuk ikut *share*. Yang pasti akan digrojoj investasi yang begitu besar.

Dengan dana sebesar 8,1 T akan bisa dimanfaatkan sebangiannya untuk bahan baku lokal dalam jumlah besar seperti batu, pasir besi, semen pasti akan menghidupkan ekonomi. Intinya komponen lokal harus diperhatikan. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, perlu pula dipertimbangkan, meski bandara modern tetapi jangan meninggalkan ciri-ciri khas budaya Yogya.

“Masa depan Kulon Progo sudah bisa kita bayangkan akan menjadi daerah yang sangat modern dan berkembang. Perumahan, industri, pasar akan berkembang, juga sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Saya kira dampak positifnya akan banyak,” ujar Yoseph menambahkan. (MPI)/ FOTO: MASTUR/PARLE/IW.

RIBUAN MASYARAKAT PROBOLINGGO NIKMATI PENGobatan GRATIS PIA-DPR

Musibah kekeringan yang melanda beberapa daerah di Indonesia menimbulkan berbagai penyakit di masyarakat salah satunya ISPA (inspeksi salurh pernapasan atas). Melihat kondisi demikian PIA (Persaudaraan Istri

Anggota) DPR RI, Sabtu (7/11) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo menggelar pengobatan gratis kepada masyarakat setempat di Dringu, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

“Sebenarnya ini termasuk dalam program bulanan PIA, karena kebetulan saat ini beberapa daerah terkena dampak kekeringan, kabut asap, maka kami menggelar bhakti sosial pengobatan gratis ini di dua daerah, NTT dan kabu-



Pimpinan PIA DPR bersama Bupati Probolinggo, Jawa Timur dalam acara pengobatan gratis

paten Probolinggo, Jawa Timur,” ungkap Ketua Umum PIA, Deisti A. Novanto.

Ada beberapa alasan PIA memilih Kabupaten Probolinggo, diantaranya Probolinggo sendiri memang menjadi salah satu daerah yang terkena musibah kekeringan, dampak karhutla (kebakaran hutan dan lahan), bahkan beberapa hari belakangan juga menjadi salah satu daerah yang terkena dampak erupsi anak Gunung Rinjani.

Atas masukan dari Anggota PIA yang

sekaligus menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Tantriana Hasan Aminuddin maka dipilihlah kabupaten yang identik dengan buah Manggur (mangga dan anggur) ini.

“Ya, ini merupakan wujud nyata kepedulian kami (PIA DPR RI) dalam membantu meringankan beban masyarakat miskin di Indonesia terutama dalam masalah kesehatan yang dirasa semakin mahal dan semakin sulit dari akses fasilitas kesehatan,” jelas Deisti.

Sementara itu Bupati Probolinggo, Tantriana Hasan Aminuddin yang juga sebagai anggota PIA mengaku bangga dan terimakasih atas kepedulian PIA terhadap masyarakat kabupaten Probolinggo.

Lebih lanjut dikatakannya, target dari kegiatan ini adalah menangani pengobatan gratis kepada seribu orang, namun kenyataannya tercatat lebih dari 1.100 masyarakat miskin memanfaatkan kegiatan ini untuk memeriksakan kesehatannya.

Dalam acara yang digelar di Kantor Kecamatan Dringu tersebut melibatkan 20 dokter umum, 1 dokter spesialis, 1 dokter spesialis penyakit dalam, 29 perawat, 10 Apoteker, 5 pembantu apoteker, 20 orang admin. Selain itu PIA juga menyerahkan bantuan berupa beras kepada para lansia di daerah tersebut.

“Kami berharap kegiatan pengobatan gratis ini tidak berhenti sampai disini, terutama bagi masyarakat penderita penyakit yang cukup serius dan membutuhkan penanganan kesehatan lanjutan. Artinya jika harus dirujuk ke rumah sakit, maka Pemkab Probolinggo dengan dinas kesehatannya harus membantunya,” tambah Wakil Ketua PIA, Grace Fadli Zon yang turut serta dalam kegiatan tersebut. (AYU), FOTO : AYU/ PARLE/HR.

Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bandara Kulon Progo Perlu Dilakukan Serentak

Komisi V DPR mendukung permintaan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X supaya ganti rugi lahan maupun bangunan untuk pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo Yogyakarta bisa dilakukan serentak. Artinya begitu *appraisal* (tim penilai) harga tanah telah memutuskan, ganti rugi segera dibayarkan.

“Saya mohon begitu harga tanah sudah diputus, masyarakat yang sudah setuju langsung dibayar. Jangan sampai ada kasus untuk menunda. Kalau ditunda, kepentingan lain akan masuk sehingga akan makin sulit,” kata Sri Sultan HB X saat menerima Tim Kunker Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Muhidin M. Said, baru-baru ini di Yogyakarta.

Sesuai jadwal yang sudah ditentukan menyusul penyerahan Ijin Penetapan



Tim Kunker Komisi V DPR saat rapat dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta

Lokasi (IPL) dari PT Angkasa Pura I kepada BPN DIY selaku pelaksanaan pengadaan tanah bandara baru Kulon Progo tanggal 28 Oktober lalu, tanggal 10 Nopember 2015 dilakukan identifikasi dan inventarisasi bidang selama 30 hari. Setelah itu diserahkan kepada tim penilai dan diperkirakan awal Juni 2016 sudah dilakukan pembayaran.

PT AP I menyatakan kesiapannya membangun bandara tersebut, begitu pembayaran ganti rugi selesai maka dilakukan *land clearing* dan dijadwalkan tahun 2020 selesai. "Pembangunan bandara baru selama 3 tahun sudah termasuk cepat, diharapkan tahun 2021 bisa beroperasi," tambah pejabat AP I.

Bandara Internasional baru Kulon

Progo ini memerlukan lahan seluas 645 ha dipesisir Kecamatan Temon, mencakup lima desa yakni Jangkar, Sindutan, Glagah, Palihan dan Kebonrejo. Terdiri tanah masyarakat seluas 466,73 ha dan tanah Pakualaman 178,90 ha.

Ketua Tim Kunker Komisi V DPR Muhidin M Said menyatakan semua masukan dalam kunjungan kerja ini akan dibicarakan bersama dengan Kementerian PU-PR. Intinya karena pembangunan bandara internasional ini sudah menjadi keputusan pemerintah, maka Dewan akan mendukung sepenuhnya.

"Jika Bandara Internasional Kulon Progo terwujud, maka kota kabupaten ini akan menjadi kota satelit baru.

Nanti Kulon Progo akan jadi rebutan, dan dampak ikutannya luar biasa bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Komisi V juga mengapresiasi Pemda Kulon Progo yang sudah menyiapkan lahan pengganti bagi masyarakat seluas 200 m2 hingga 500 m2 per KK. Relokasi, tanah dekat desanya dan sudah diidentifikasi dengan estimasi 200 m2/ KK yang dipindah maksimal 500 m2. Lahan pertanian juga disiapkan, sebab pada tahap sosialisasi sudah banyak komunikasi dengan masyarakat bahwa mereka ingin pindah tidak terlalu jauh dari kampung halaman sebelumnya.

(MPI)/FOTO:MASTUR/PARLE/IW.

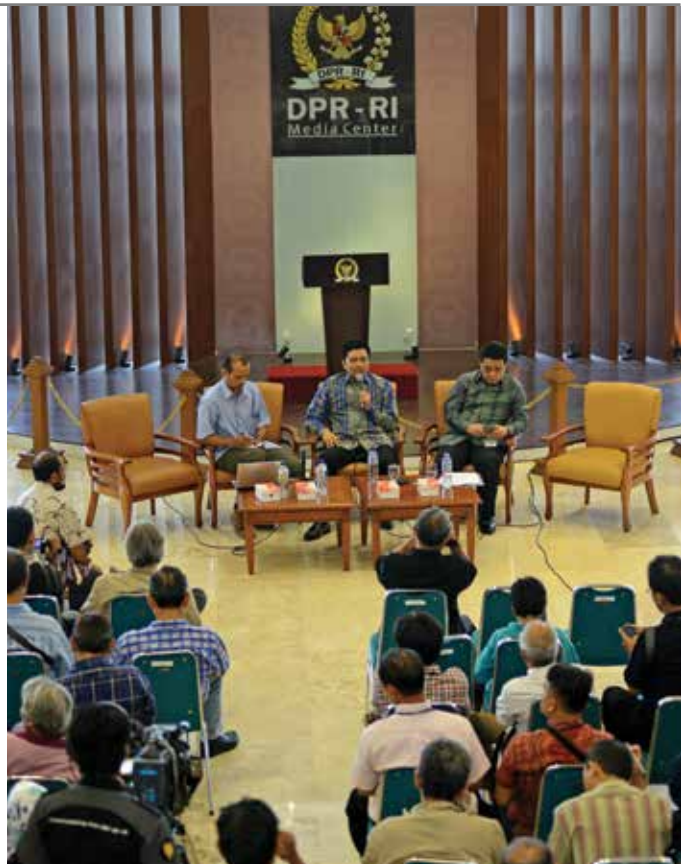
JOKOWI HARUS BERANI KELUAR DARI TEKANAN PARPOL

Terkait *reshuffle* kabinet kerja jilid II yang akan dilakukan Presiden Jokowi-JK dalam waktu dekat ini harus benar-benar berani keluar dari tekanan partai politik. Karena dalam satu tahun pemerintahan ini hampir semua sektor kehidupan turun drastis. Baik ekonomi, politik, rendahnya penyerapan anggaran, meningkatnya jumlah kemiskinan dan pengangguran dan sebagainya.

"Jadi, Presiden Jokowi harus berani keluar dari tekanan parpol. Apalagi koordinasi di internal kabinet belum berjalan bahkan terjadi kegaduhan politik. Seperti Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Wapres Jusuf Kalla, PDIP dengan Meneg BUMN Rini Soemarno, dan lain-lain," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria (Gerindra) dalam dialektika demokrasi dengan tema "Reshuffle Kabinet untuk Siapa?" bersama pengamat politik UI Agung Suprio di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Tapi, kalau dengan *reshuffle* jilid II ini tidak juga ada perbaikan khususnya dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat kata Reza Patria, berarti kesalahan ada pada Presiden RI, yang mungkin tidak mampu mengelola pemerintahan ini dengan benar. Hal itu sudah terlihat sejak memerintah di mana janji-janjinya tidak terpenuhi. "Misalnya koalisi tanpa syarat dan tidak bagi-bagi kekuasaan, kabinet yang profesional, kabinet yang ramping dan pro rakyat. Padahal, waktunya cukup untuk menyusun zaken kabinet," ujarnya.

Termasuk diplomasi luar negeri, yang selama ini sudah terjalin kerjasama yang baik dengan Jepang, tapi dalam proyek kereta api (KA) cepat seperti Jakarta - Bandung, tiba-tiba memilih China, tanpa mempertimbangkan urgensinya. Padahal alokasi anggarannya meski bisnis (B to B) tetap akan mengambil dari PMN ke tiga BUMN yang nilainya Rp 39 triliun. "Jadi, diplomasi macam apa ini? Termasuk memutuskan pulang dari Amerika Serikat dengan alasan kabut asap, ternyata Jokowi juga akan disambut demo dengan celana



Suasana dialektika demokrasi dengan tema "Reshuffle Kabinet untuk Siapa?" di Gedung Nusantara III Senayan Jakarta

pendek di California akibat tidak mampu menangani asap itu," tambahnya.

Sementara, Agung Suprio mengakui jika terjadi miskordinasi di internal kabinet Jokowi selama ini, kinerjanya kurang baik dan sebagainya. Sebelumnya Menkopolkam yang menyebut rakyat tidak jelas, Seskab Andi Widjojo, yang sering memberi informasi yang salah pada Jokowi sudah diganti. "Saat ini pergeseran itu belum selesai. Seperti halnya Rizal Ramli dengan Wapres, Meneg ESDM, Dirut Pelindo II RJ Lino, dan lainnya," katanya.

Karena itu dia berharap *reshuffle* jilid II nanti seharusnya berdasarkan kinerja. Yang terakhir soal penanganan kabut

asap jelas menjadikan popularitas presiden menurun, merugikan rakyat dan Indonesia tercoreng di mata internasional. Dengan begitu, maka Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Keajaung HM. Prasetyo yang tersandung kasus korupsi mantan Sekjen NasDem Patrice Rio – Gubernur Sumuit Pujo, sehingga ambigu dalam penegakan hukum, dan Meneg BUMN Rini Soemarno yang tidak disukai oleh PDIP, ketiganya layak direshuffle.

“Maka Pansus Pelindo II secara politik

targetnya adalah Meneg BUMN. Ketua Umum DPP PDIP Megawati pun juga mengkritik KA cepat Jakarta – Bandung, maka kemungkinan akan diganti. Ditambah masuknya PAN ke dalam pemerintahan, maka menjadi faktor pertimbangan *reshuffle* kabinet tersebut. PAN pasti diterima untuk memperkuat pemerintah di DPR RI,” ungkapnya.

Hanya saja reshuffle kabinet yang dilakukan selama ini kata Agung, tidak berdasarkan indikator yang jelas. Seperti kenapa Puan Maharani dan Yudhi

Chrisnandi dipertahankan, lalu Andrinov Chaniago selaku Kepala Bappenas dilengserkan? “Apakah betul karena Andrinov menolak proyek KA cepat Jakarta – Bandung, lalu dilengserkan? Tapi, dengan berpihak ke China itu bukan berarti Jokowi akan membangun poros Jakarta – Peking, tapi nyatanya pemerintah ini memang *all block*, terbuka untuk semua,” pungkasnya. (SC)/

FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

PENANGANAN KORUPSI HARUS LUAR BIASA

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga penanganannya pun juga harus luar biasa. Penanganan kejahatan korupsi jangan sampai terhambat.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI, Wenny Haryanto saat pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Suhardi, di Makassar, belum lama ini. Pertemuan ini dalam rangka kunjungan kerja Komisi III DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman.

“Sayangnya, di Sulsel ini khususnya banyak sekali temuan-temuan, yaitu sebanyak 144 kasus dugaan korupsi, namun sejak Semester I Tahun 2015 kasus ini tidak diproses secara maksimal atau tidak ditindaklanjuti. Apa sebabnya penanganan kasus ini begitu lambat?” tanya Wenny.

Selain itu, lanjut politikus Fraksi Partai Golkar itu, dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sulsel selama lima tahun terakhir, diduga transaksi tersebut berupa kasus penipuan, korupsi, penggelapan pajak yang mayoritas pemilik rekeningnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pengusaha.

“Bahkan, menurut Wakil Direktur Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel, Kadir Wokanubun, te-

muan tersebut membuktikan bahwa kinerja aparat penegak hukum di Sulsel khususnya itu belum maksimal. Ini apa sebetulnya yang terjadi, mengapa bisa tidak maksimum,” heran Wenny.

Lebih jauh, politikus asal dapil Jawa Barat itu menanyakan juga hambatan apa yang dialami Kejaksaan dalam menanggapi perkara tindak pidana korupsi di Sulsel.

“Temuan ini memperlihatkan ke kita bahwa kinerja aparat hukum Kejaksaan dan Kepolisian tidak bekerja secara maksimal untuk pencegahan tindak pidana korupsi,” kritik Wenny.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Suhardi mengatakan bahwa hambatan dalam penanganan perkara pidana korupsi tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang hanya ada di Ibukota Provinsi Sulsel dan Sulbar.

“Tempat tersebut cukup jauh dari beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel. Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan pembiayaan yang tinggi untuk menghadirkan saksi-saksi dan mobilisasi atau akomodasi bagi tim Jaksa Penuntut Umum serta pengamanan yang ekstra. Sehingga memberikan pengaruh nega-



Anggota Komisi III DPR Wenny Haryanto

tif terhadap optimalisasi percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi,” papar Suhardi.

Untuk itu, lanjut Suhardi, berdasarkan hal tersebut dapat diwacanakan pembentukan Pengadilan Tipikor di masing-masing wilayah hukum kabupaten/kota, agar memudahkan proses dan tujuan optimalisasi percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat tercapai sesuai dengan asas peradilan pidana sederhana, cepat, dan biaya murah.

“Selain itu, jumlah Jaksa juga terbatas, sementara volume pekerjaan tinggi dan Jaksa masih harus melaksanakan sidang yang tempatnya jauh dari tempat tugasnya,” ungkap Suhardi. (IW)/

FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

KEBERADAAN WNA PERLU DIAWASI

Keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu diawasi. Karena bukan tidak mungkin, WNA ini memiliki modus untuk mencari suaka politik di Indonesia, namun sebetulnya melakukan transaksi narkoba di Tanah Air.

“Apakah ada orang asing yang ditahan karena kasus narkoba di Sulsel,” tanya Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, dalam pertemuan antara Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan Kakanwil Kemenkum HAM dan jajarannya, di Makassar, baru-baru ini.



Tim Kunker Komisi III DPR saat rapat dengan Kakanwil Kemenkum HAM dan jajarannya di Makassar

Politikus Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan, pihaknya ingin mendapatkan informasi mengenai hal ini. Karena penanganan orang asing ini dikaitkan dengan kasus-kasus narkoba.

“Kita ingin mendapatkan penjelasan dan data kebangsaan, ini ada hubungannya dengan penanganan orang asing, seperti kebangsaan Afghanistan, Somalia, Sudan, Afrika, Nigeria dan sebagainya,” pinta politikus asal dapil NTT itu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Keimigrasian Sulawesi Selatan, Ramli HS mengatakan ada satu orang asing berkebangsaan Thailand tertangkap terkait dengan kasus

narkoba. “Sudah kita tahan di Rutan Maros,” jelasnya.

Selain itu, Ramli juga menjelaskan bahwa jumlah warga negara asing pencari suaka di Sulsel ini berjumlah 2.120 bahkan ini yang paling banyak di seluruh Indonesia. Sebagian besar dari warga negara asing pencari suaka ini adalah berkebangsaan Afghanistan.

Menyangkut jumlah warga negara asing yang bekerja atau berada di wilayah Sulsel, Ramli menjelaskan, di Sulsel, warga negara asing berjumlah 4.284 orang, dimana diantaranya pemegang izin tinggal kunjungan 1.117 orang, izin tinggal terbatas 951 orang, izin tinggal tetap 94 orang, warga negara binaan masyarakat karena kasus narkotik dan kasus keimigrasian 2 orang, dan sebagai pencari suaka 2.120 orang.

Dari 951 orang pemegang izin tinggal terbatas ini, tambah Ramli, yang murni melakukan kegiatan bekerja di wilayah Sulsel ini berjumlah 415 orang. 234 orang berstatus mengikuti suami atau kepala rumah tangganya, 264 orang sebagai mahasiswa atau pelajar, 29 orang status sebagai peneliti, 7 orang wisatawan lanjut usia, dan 2 orang eks warga negara Indonesia yang ingin mengakhiri masa hidupnya di Indonesia.

“Oleh karena itu mereka ini diberikan fasilitas izin tinggal terbatas. Jadi pada prinsipnya sebagaimana data yang ada pada kami keberadaan mereka ini memang melakukan kegiatan secara legal dan juga dibekali perizinan yang legal,” jelas Ramli. (IWI)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

Anggota DPR Yudi Kotouky Dukung Pembentukan Provinsi Papua Tengah

Anggota Komisi II DPR Muhammad Yudi Kotouky mendukung dibentuknya Provinsi Papua Tengah. “Saya sebagai wakil rakyat Papua sangat setuju dan sedang berupaya maksimal mendorong agar Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru. Di DPR telah dilakukan beberapa kali rapat dengar pendapat dengan masyarakat Papua, Pemerintah Provinsi Papua, dan pihak terkait lainnya” kata Yudi saat berkunjung ke Biak, Papua, Senin (2/11).

Menurut Politisi F-PKS ini, akses pelayanan publik di Provinsi Papua sekarang sangat jauh. Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten di Papua saat ini membutuhkan biaya dan waktu yang banyak untuk menjangkau pemerintah provinsi Papua.

“Jadi, saat ini sangat diperlukan pemerkaran untuk menciptakan kemandirian daerah, mempercepat pembangunan, dan mendekatkan pelayanan publik di wilayah Papua. Selain itu, cakupan wilayah di Papua sangat luas” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Yudi, sudah berbagai upaya dan langkah yang dilakukan. Mulai dari mendorong Pemerintah Provinsi Papua sebagai



Anggota Komisi II DPR Muhammad Yudi Kotouky saat mengunjungi Biak, Papua

daerah induk untuk memberikan rekomendasi, menyerap aspirasi masyarakat Papua dari semua elemen terkait pemerkaran, mendorong dan mendapatkan dukungan fraksi agar Papua Tengah masuk dalam daftar daerah otonomi baru, melakukan kajian dan diskusi

penguatan, dan mendorong panitia pemerkaran untuk menyusun secara lengkap persyaratan-persyaratan pengajuan daerah otonomi baru, serta upaya-upaya lainnya.

Ditambahkannya, langkah selanjutnya sekarang mengawal usulan terse-

but di DPR dan mendorong pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri agar usulan pembentukan Provinsi Papua Tengah diprioritaskan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menyatakan setuju pembentukan Provinsi Papua Tengah. “Kalau pem-

bahasan DOB berlangsung di DPR RI, saya siap berkoordinasi dengan komisi terkait, Pemda dan pemerintah pusat,” kata Fahri saat melakukan kunjungan yang sama ke Biak.

Ia menyatakan, penambahan satu provinsi di Papua menjadi Papua Te-

ngah jangan dinilai dari berapa uang yang dihabiskan. “Justru dengan adanya penambahan provinsi baru, memberikan kewenangan otonomi dan bisa mengurus wilayah sendiri,” kata Fahri.

(JK,MP), FOTO : JAKA/PARLE/HR.

KOMISI III DPR KELUHKAN LANGKANYA HAKIM DI SULSEL

Anggota Komisi III DPR Ahmad Zacky Siradj (F-PG) menyampaikan keluhan atas langkanya hakim di Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menilai, hal ini dapat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal keadilan. Sehingga, hal ini perlu menjadi perhatian juga bagi Komisi III DPR, selaku Komisi Hukum.

Demikian disampaikan Zacky, saat bertemu dengan jajaran empat lingkungan Peradilan se-wilayah Sulawesi Selatan, di Kantor Pengadilan Tinggi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (3/11/15). Pertemuan ini masih dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi III DPR ke provinsi yang terkenal dengan Coto Makassar-nya itu.

“Bagaimana kita ingin melayani keadilan kepada rakyat apabila hakim saja langka, hakim saja tidak ada. Bagaimana rakyat bisa dilindungi oleh kita tentang keadilan. Saya kira ini persoalan yang serius bagi kita karena keadilan adalah hak dasar bagi warga negara, kewajiban negara dalam melindungi rakyat,” tegas Zacky.

Politikus Fraksi Partai Golkar itu menilai, pernyataan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan tidak adanya hakim ini bisa menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal penegakan keadilan menjadi fundamental yang sangat penting.

“Oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman Komisi III serta pimpinan Komisi III bagaimana untuk mendapatkan hakim-hakim yang berkualitas, berintegritas, dan bermoral tinggi dalam melayani masyarakat ini,” ingat Zacky.

Dalam kesempatan ini, Zacky juga menyoroti masalah anggaran pada masing-masing Wilayah Peradilan di Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan pagu definitif yang diterima selama lima tahun terakhir. Ia mempertanyakan, apakah mengalami peningkatan anggaran yang signifikan.

Sementara itu sebelumnya, Ketua Pengadilan Tinggi



Suasana pertemuan Komisi III DPR dengan empat lembaga peradilan se-wilayah Sulawesi Selatan di Makassar

Makassar, Andi Suryadarma Belo menyatakan bahwa masih perlu penambahan formasi tenaga hakim, pejabat struktural dan staf pegawai yang pada umumnya di semua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar. Pasalnya, semua pengadilan negeri mengalami kekurangan tenaga hakim dan pegawai.

“Masalah anggaran dalam pelaksanaan tugas kedinasan masih perlu ditambah karena masih terdapat rumah dinas hakim dan pejabat struktural yang memerlukan biaya pemeliharaan, terutama pengadilan yang baru terbentuk. Kemudian penambahan anggaran perjalanan dinas untuk melakukan pengawasan di semua satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar,” jelas Andi seraya menambahkan pagu definitif yang diterima selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR, sekaligus Ketua Tim Kunker, Benny K Harman (F-PD) mengatakan hasil diskusi ini menjadi catatan dan masukan yang sangat berguna bagi Komisi III DPR.

“Salah satu fungsi kami adalah melakukan pengawasan. Termasuk mengawasi para hakim. Tapi ada yang bilang hakim tidak boleh diawasi, siapa bilang tidak boleh? Tetap bisa kita awasi. Yang tidak boleh itu mengintervensi,” ingat politikus asal dapil NTT itu. (IW)/FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/IW.

GABUNG TPP, PEMERINTAH DINILAI SALAH JALAN

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk bergabung dengan kerja sama ekonomi Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership) dinilai sebagai kebijakan yang salah jalan. Langkah itu jelas ber-

tentangan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang selama ini diusungnya.

“Bergabung dalam TPP sama halnya dengan melayani kepentingan korporasi besar dan orang-orang kaya. Jokowi

sepertinya telah lupa dengan jalan kerakyatan yang selama ini dikobarkan,” kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/15).

Lebih lanjut menurutnya niat Jokowi untuk bergabung dalam TPP dapat mengancam kepentingan nasional. Bagaimana tidak? Untuk diketahui, TPP—sebelumnya bernama Trans-Pacific Strategic Economic Partner-

ship (TPSE)—adalah skema liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang komprehensif, terjadwal, dan mengikat. Bahkan, TPP disebut-sebut lebih progresif karena mencakup isu-isu WTO-Plus.

Dengan bergabung ke TPP lanjut politisi FP Gerindra ini, Indonesia akan diikat dengan kewajiban mereduksi tarifnya hingga mencapai 0 persen pada semua pos tarif di semua sektor, termasuk sektor sensitif seperti kesehatan, asuransi, dan jasa keuangan. Indonesia juga wajib menerapkan kebijakan pengurangan biaya transaksi perdagangan, kebijakan kompetisi, *government procurement*, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan kebijakan investasi.

TPP juga dipandang luas sebagai alat politik dan ekonomi AS. Bahkan, dalam draft rahasia TPP yang pernah bocor ke publik tahun 2013, disebutkan bahwa TPP tidak lain merupakan kontrol korporasi atas berbagai sektor kehidupan manusia.

“Tidak berlebihan kalau banyak pihak menyebut bahwa dukungan Jokowi untuk bergabung dalam TPP adalah kemenangan politik dan ekonomi Obama



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

dan AS. TPP akan menjadi jalan masuk ke akses pasar yang lebih luas seperti Indonesia yang menjanjikan keuntungan yang besar di tengah terpuruknya ekonomi AS dan Eropa,” tutur dia.

Pada bagian lain wakil rakyat dari dapil Jabar IV ini menyebut TPP tidak senafas dengan prinsip “sentralisasi ASEAN” yang selama ini menjadi pijakan politik luar negeri Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai basis kelembagaan dari semua bentuk

kerjasama regional.

Keputusan ini juga berarti membuka pintu secara lebar-lebar bagi masuknya gempuran asing di tengah melemahnya daya saing ekonomi nasional secara umum dan banyaknya kelemahan-kelemahan dalam ekonomi domestik yang harus lebih dahulu dibenahi. “Hal yang tidak kalah penting mengecilnya kesempatan bagi pengusaha nasional, pengusaha di daerah, pemerintah daerah dan masyarakat secara umum untuk terlibat dalam pembangunan nasional,” tegas Heri.

Sebagai pemimpin bangsa yang besar, sudah semestinya Presiden Jokowi berperan sebagai pelopor usaha dan kerja sama regional, dan bukan sebagai pengikut. Indonesia harus memelopori usaha yang mengarahkan negar-negara anggota ASEAN dan Asia Timur untuk lebih fokus pada upaya-upaya kerjasama ekonomi dalam kerangka ASEAN, dengan berpijak pada prinsip “sentralitas ASEAN” yang secara eksplisit tercantum dalam Piagam ASEAN dan menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia. (SPY/IKY) FOTO: AN-DRI/PARLE/KY

SETJEN DPR GELAR SIMULASI KEBAKARAN DI LINGKUNGAN DPR

Jumat pagi (13/11/2015), tiba-tiba Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI muncul asap tebal dan sirine kebakaran berbunyi dengan kencang, seluruh pegawai yang ada di Gedung Setjen DPR berhamburan keluar gedung. Petugas Damkar dari Setjen DPR tiba di lokasi kebakaran dan dibantu oleh Suku Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta segera memadamkan api dan mengevakuasi seluruh pegawai yang ada di Gedung Setjen DPR. Namun hal itu ternyata hanya SIMULASI yang dilakukan Setjen DPR dalam mengantisipasi jika terjadi kebakaran di Lingkungan Setjen DPR.

Dalam sambutannya, Kepala Bagian Diklat Setjen DPR Mohammad Djazuli sampaikan bahwa simulasi penanggulangan dan evakuasi kebakaran di Lingkungan DPR untuk memberikan pengetahuan dasar penanggulangan kebakaran bagi Pegawai Setjen DPR dengan peralatan yang tersedia, meningkatkan keterampilan peran petugas



Sekjen DPR Winantuningtyastiti membuka simulasi evakuasi kebakaran di gedung DPR

kebakaran gedung serta mengerti cara evakuasi dan penyelamatan ketika ter-

jadi kebakaran.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal

DPR RI Winantuningtyastiti Swasanani menyampaikan bahwa simulasi penanganan kebakaran yang dilakukan bersama Suku Dinas Pemadam Kebakaran penting dilakukan, karena banyak gedung tua di DPR.

“Simulasi ini kami bekerja sama dengan Suku Dinas Kebakaran DKI Jakarta, simulasi memang penting, karena di lingkungan DPR banyak bangunan gedung bertingkat yang sudah tua,” ungkap Win, panggilan akrab Sekjen DPR.

Win juga sampaikan bahwa telah

membentuk tim penyelamatan kebakaran yang terdiri atas 150 orang pegawai DPR, untuk melakukan penanganan awal jika terjadi kebakaran di DPR. Tim itu mendapatkan pelatihan langsung oleh Sudin Damkar Jakarta Pusat.

“Semua penghuni, pegawai di DPR, memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencegah kebakaran, misalnya setelah selesai dipakai, komputer, televisi harus dimatikan,” ungkapnya.

Selain itu, dalam simulasi ini Sudin Damkar juga melakukan pengecekan

terhadap pemenuhan standar fasilitas penanganan kebakaran di Gedung DPR.

Kepala Sudin Damkar Jakarta Pusat Idris mengatakan dalam simulasi kali ini pihaknya menurunkan enam unit mobil pemadam kebakaran terdiri atas unit pompa dan unit tangga.

“Tim penanganan kebakaran yang dimiliki DPR terampil dan tahu harus melakukan apa jika terjadi kebakaran, simulasi seperti ini harus berkala dilakukan,” ungkap Sudin Damkar Jakarta Pusat. (SKRI) FOTO: DENUS/PARLE/HR

DARI BANTUL, PLTB MENERANGI INDONESIA



Anggota Komisi VII DPR Kurtubi

Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Samas Bantul memberikan harapan baru untuk mengatasi masalah kurangnya ketersediaan listrik di Yogyakarta dan Indonesia umumnya. PLTB merupakan alternatif energi terbarukan yang aman, ramah lingkungan dan tanpa emisi. Selain itu PLTB akan berkontribusi pada target energi hijau Indonesia sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Disela-sela meninjau lokasi pembangunan PLTB Samas Bantul, Selasa (10/11/2015), Ketua Komisi VII Kardaya Warnika menyampaikan dukungan atas pembangunan proyek PLTB Samas Bantul. PLTB adalah energi terbarukan yang sangat potensial di Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia memiliki potensi angin yang jauh lebih produktif dari yang diperkirakan. Jika PLTB Samas berhasil dioperasikan maka ini akan me-

nyelamatkan Indonesia dari kekurangan energi.

“Saya sangat mendukung proyek PLTB, karena ini nantinya yang bisa menyelamatkan Indonesia dari kekurangan energi pada masa depan,” ungkap Kardaya.

Lokasi pengembangan PLTB yang rencananya di sepanjang pantai selatan meliputi tiga kecamatan, yakni Kretek, Sanden, dan Srandakan terletak di Pantai Gua Cemara Kecamatan Sanden.

“PLTB bisa menyelamatkan Indonesia dari kekurangan energi, karena sumber energi dari pembangkit ini adalah bayu atau angin dan matahari yang bisa didapat dengan mudah serta tidak akan habis,” ungkapnya.

“Coba kalau kita mengandalkan energi fosil lainnya seperti minyak dan batu bara yang jelas selain merusak lingkungan juga akan habis, makanya ini potensi kita dengan memanfaatkan tenaga angin dan matahari,” terang Kardaya.

Menurut Kardaya, dengan adanya PLTB ini akan berdampak pada harga listrik yang murah nantinya, ketika sumber energi dari fosil susah didapat, atau dibanding listrik yang dihasilkan dari energi konvensional.

“Ke depan pasti harganya murah, karena mahalnya hanya pada pembangunan di awal, karena tidak ada biaya bahan bakar, dan angin ini gratis, sehingga akan lebih murah,” jelasnya. Dalam peninjauan ke lokasi pembangunan proyek PLTB, Kardaya mengatakan, pihaknya bisa memastikan proyek pengembangan PLTB yang bisa mem-

bangkitkan energi hingga 50 megawatt itu tidak hanya rencana. Pasalnya investor akan mulai pembangunan fisik pada 2016 dan target mulai operasi 2017.

“Mereka (investor) bilang tahun 2016 akan mulai fisiknya, dan ini suatu proyek yang sangat bagus bagi negara dan rakyat, karena kalau kita membangun PLTB berarti untuk pembangunan masa depan,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi VII Kurtubi berharap pembangunan proyek PLTB bisa segera direalisasikan dan segera beroperasi. Lebih lanjut, Kurtubi mengatakan, PLTB merupakan energi terbarukan yang sangat potensial, dimana daerah-daerah di Indonesia memiliki angin yang produktif.

Dia berharap, agar proyek PLTB Samas segera diselesaikan dan setelah itu bisa mengembangkan PLTB di Daerah Pemilihan yaitu Nusa Tenggara Barat.

“Kita berharap PLTB Samas Bantul segera diselesaikan dan setelah itu PLTB dikembangkan di Dapil saya NTB. Selama ini di NTB sangat kekurangan listrik dimana hampir setiap hari terjadi pemadaman listrik bergilir,” ungkap Kurtubi.

“Jika pembangunan proyek PLTB Samas Bantul berhasil, maka ini akan menjadi pertama dan satu-satunya daerah yang sudah mengembangkan potensi angin sebagai energi alternatif, dan tentu ini akan bisa membantu mengatasi kekurangan energi listrik di Indonesia. PLTB Samas Bantul akan menjadi daerah percontohan, dari Bantul Menerangi Indonesia,” ungkapnya. (SKRI) FOTO: SINGGIH/PARLE/HR.



Apel Pamdal, kesiapan pengamanan menuju Parlemen Modern di halaman Gedung Nusantara III Senayan, Senin (09/11)
Foto: Eka Hindra, Andri/Parle/HR



Simulasi pemadam kebakaran dan evakuasi korban di kompleks Parlemen, Jumat (13/11)
Foto : Andri, Denus/Parle/HR



Tim Kunker Komisi VII DPR meninjau lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Samas Bantul Yogyakarta
Foto : Singgih/Parle/HR